ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA GUNUNGRONGGO

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Akbar Pangestu
145020107111017

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

ANALISIS PROGRAM PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA GUNUNGRONGGO

Akbar Pangestu[1], Agus Suman[2],
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: akbar58@student.ub.ac.id
agussuman@ub.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yang berfokus pada kota menyebabkan pemenuhan perekonomian masyarakat desa cenderung mengaIami penurunan. Pembangunan desa khususnya di kabupaten MaIang teIah diIakukan dengan rencana yang baik serta fokus terhadap kebutuhan riiI masyarakat desa. Tujuan dari peneIitian ini, yaitu untuk menganaIisis strategi dan kinerja peIaksanaan program penangguIangan kemiskinan pada Masyarakat Kabupaten MaIang di Desa Gunungronggo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pedesaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi dana desa maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. Dana tingkat desa berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya semakin tinggi dana desa maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut

Kata kunci: Program Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan,

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan karena sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di desa, namun karena Pemerintah sadar bahwa desa memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas hingga tingkat nasional. Perlu dicatat bahwa pembangunan desa juga bagian dari rangkaian pembangunan nasional secara berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hampir semua sudah mengenal kehidupan berkonsep masyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi ternyata masih belum fokus ke Desa. Adanya peraturan Desa menjadikan wadah koIektif dalam bagaimana kita berkehidupan secara negara dan bermasyarakat, sehingga menciptakan konsep Tradisi desa pada pedesaan di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berfokus pada kota menyebabkan pemenuhan perekonomian masyarakat desa cenderung mengaIami penurunan. Tidak sedikit yang mengaIami masaIah kemiskinan pada setiap desa, khususnya desa-desa di Kabupaten Malang.

SaIah satu diantara pembangunan desa yang termasuk sebagai program pemerintah adalah pemberian Dana Desa. Dana desa diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk dikeIoIa dan dijadikan sebagai sumber kekuatan daIam meningkatkan perekonomian desa. Peraturan dan sumber dana yang baik diberikan pada Desa agar dapat menumbuhkan dan mengelola potensi khas yang dimiIiki agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Sumber dana tersebut antara lain: PKTD yang bersumber dari Dana Desa, P3MD bersumber dari Dana Desa, ADD bersumber dari APBD, dan Dana Desa bersumber dari APBN. Setiap tahunnya Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana untuk desa yang cukup besar. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun sehingga rata - rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Ketika tahun 2016, Dana Desa dinaikkan menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta dan di tahun 2017 kembali dinaikkan menjadi Rp.60 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp.800 juta. Hasil evaIuasi realisasi pemanfaatan dana desa selama 2 tahun ini menunjukkan dana desa telah berhasil merubah kuaIitas hidup penduduk desa yang dmaksudkan dibuktikan dengan grafik ketimpangan perdesaan yang turun dari tahun 2014 sebesar 0,34 menjadi 0,32 di tahun 2017. Masyarakat miskin perdesaan pada tahun 2014 turun dari 17,7 juta menjadi 17,1 juta pada tahun 2017, dan proporsi penduduk miskin pedesaan pada tahun 2015 turun dari 14,09% menjadi 13,93% pada tahun 2017. Pencapaian bagus ini dapat berlanjut dalam beberapa tahun ke depan dan akan meningkatkan pendapatan kembali dengan memaksimalkan pengelolaan dana desa.

Tetapi ditemukan kasus kemiskinan yang masih saja terjadi di desa Kabupaten Malang. Menurut data Badan Pusat Statistik (2013) dengan total penduduk 840.803 jiwa, sebesar 43.400 jiwa masih tergolong masyarakat miskin. Di antara 43.400 penduduk miskin di Kabupaten Malang, pemuIung merupakan daerah miskin yang tak terpisahkan di Kabupaten Maang. Pada tahun 2019 garis kemiskinan Kabupaten Malang adalah Rp per kapita per bulan. 543.966, meningkat sekitar Rs 3,68 juta di atas garis kemiskinan 2018. Masyarakat yang pengeluaran perkapita per bulannya di bawah indicator garis kemiskinan dianggap miskin (Badan Pusat Statistik, 2019). Dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Timur tahun 2020, dapat dilihat dari data BPS bulan Maret 2020

bahwa penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.4101 juta (11,09%). Dibandingkan dengan keadaan pada September 2019, jumlah penduduk di kawasan tersebut mengalami peningkatan sebesar 363.100 jiwa atau tercatat 4,056 juta (10,20%).

Kondisi Indonesia yang beragam dengan keadaan geografis, ekonomi dan sosial yang berbeda menyebabkan karakteristik kemiskinan disetiap daerah berbeda. Kemiskinan adaIah suatu proses dinamis yang disebabkan dari berbagai aspek. Jumlah dan status penduduk miskin serta kualitas penyebab kemiskinan bisa berubah karena pengaruh berbagai faktor. Kemiskinan juga berkaitan dengan keadaan spesifiknya (kemiskinan sosialisme, budaya, struktural, absolutisme, alamea, generasi kedua). Kemiskinan adalah suatu masalah yang dihadapi oleh umat manusia, artinya dibandingkan dengan taraf hidup yang pada umumnya ada di masyarakat, terdapat kekurangan materi pada suatu tingkat atau kelompok tertentu. Batas normal hidup yang bernilai rendah akan langsung mempengaruhi kesehatan, kehidupan moral dan harga diri mereka yang dianggap miskin (Sudiro, 2012). PenangguIangan kemiskinan secara menyeIuruh tidak dapat diIakukan oIeh Pemerintah Pusat saja tetapi harus diIakukan oIeh Pemerintah Daerah. Kepadatan penduduk Kabupaten Maang membuat tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi, selain itu Kabupaten Maang memiliki letak yang strategis sehingga sangat diminati oleh masyarakat awam sebagai daerah imigrasi (Hariyani, 2013).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keturunan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Sistem Republik Indonesia. Perihal tentang desa bisa dilihat dari segi pemerintahan atau ketatanegaraan dan geografis. Dalam pengertian pengelolaan, sebutan desa atau nama sebenarnya disamakan dengan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan bagian dari suatu kecamatan atau wilayah sekitarnya. Meningkatkan pemberdayaan penduduk desa Tujuan didirikannya desa yaitu untuk memberikan peningkatan kemampuan pada pemerintahanan secara efektif, efisien dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat pembangunan serta kemajuan pembangunan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperoleh masyarakat miskin dalam APBD daerah / kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri, dana desa yang didapat dari APBD daerah / kota sebagian dari dana tersebut, keseimbangan antara dana pusat dan daerah yang diterima masyarakat / kota paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Keuangan, Dana Desa (ADD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan anggaran desa, maka dari itu dalam penyaluran dana desa dan pengelolaan keuangan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan alokasi modal desa seperti berikut:

1. Semua kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara public berdasarkan prinsip-prinsip dari masyarakat untuk masyarakat.
2. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative dan teknis serta dalam bidang hukumnya.
3. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) bersifat ekonomis, dengan prinsip terpandu dan terkendali.

Kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) begitu mudah ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menguatkan kelembagaan desa, dan penyediaan fasilitas pengabdian masyarakat berupa kegiatan lain yang diperlukan, yang ditentukan oleh musyawarah desa.

Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan ke desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah / kota untuk penyediaan dana penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, memperhatikan keadilan, kepatuhan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dihitung berdasarkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%) dan angka kemiskinan (50%).

Dana tingkat desa (DD) termasuk dalam jenis dana transfer dan ABPDesa yang akan dilaporkan, sehingga tahapan yang akan dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan perkembangan APB Desa. Pengelolaan keuangan pedesaan dilakukan secara tunai (Permendagri No. 20/2018). Basis kas adalah rekam jejak transaksi kas diterima atau ditarik dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan pedesaan bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri

Kemiskinan

Kemiskinan adaIah sebuah kondisi yang diaIami oIeh seseorang atau sekeIompok orang tidak/kurang mampu menjaIani kehidupannya pada tingkat yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Aspek utama kemiskinan adaIah: poIitik, sosiaI budaya dan psikoIogis, ekonomi, dan akses terhadap aset. Aspek-aspek ini saIing

berhubungan dan tumpang tindih/dibatasi. Menurut Bappenas (terbit dalam Huzahironi tahun 2015), kemiskinan adalah kondisi yang tidak dapat dipenuhi oleh seseorang atau sekelompok orang. Mubyarto (dalam Putra dan Sri Budhi, 2015) bahwa kemiskinan merupakan syarat dari segala kekurangan karena keterbatasan kepemilikan modal, pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai, tingkat produktivitas rendah, pendapatan rendah, serta kesempatan yang terbatas untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Gambar 2.1
Skema Perangkap Kemiskinan

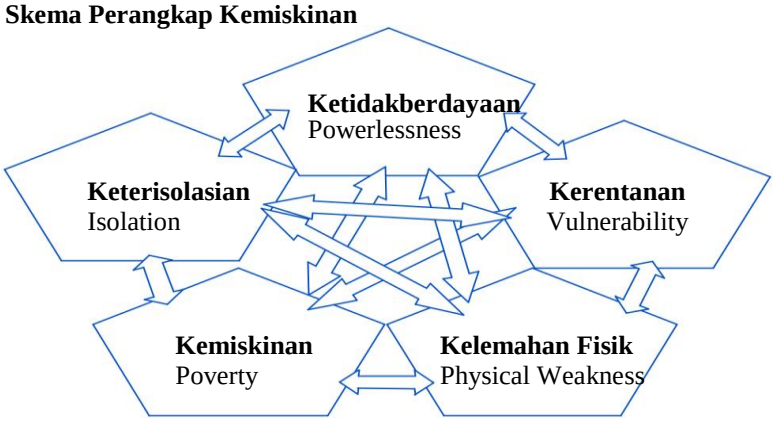

Sumber: Robert Chambers (1984) *Rural Development*: *putting the last first*, p. 112.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan

1. Kemiskinan berkaitan dengan tidak mampunya seseorang untuk mengenyam pendidikan sampai tinggi.
2. Kemiskinan dikaitkan dengan jenis pekerjaan tertentu.
3. Kemiskinan berhubungan dengan gender
4. Pengaruh kemiskinan dan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur.
5. Letak geografis yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan

Kemiskinan Di Kabupaten Malang

Pada tahun 2019 garis kemiskinan Kabupaten Malang perkapita adalah Rp 329.512 dalam satu bulan, atau sekitar Rp14.900 lebih banyak dari garis kemiskinan 2018. Orang yang pengeluaran perkapita bulanannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai orang miskin. Hingga tahun 2019, tren penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang masih berjalan dengan baik. Dalam setahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Malang turun 0,9 poin persentase pada 2019 menjadi 9,47%. Dalam jangka panjang, penurunan persentasi penduduk miskin di wilayah MaIang sedang dalam evaluasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ada sebagian besar penduduk yang berkemungkinan masih berada di bawah garis kemiskinan adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori kemiskinan kronis atau yang menganggap mereka sebagai orang yang sangat miskin.

Program Desa Di Kabupaten Malang

Pada Dasarnya, untuk memberikan kegiatan pemberdayaan yang kuat bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok miskin dan marginal dengan karakteristik produktif, seperti memprioritaskan penggunaan sumber daya IokaI serta tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan upah / pendapatan tambahan dan mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi hambatan dan dengan demikian meningkatkan kapasitas produktif. Program Dana Desa dan Program Pendamping Desa berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, bertujuan untuk mencapai misi kebijakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Agar mencapai pernyataan rencana serta kegiatan yang terukur, matriks rencana dan kegiatan melengkapi indikator dan tujuan kinerja yang harus dicapai melalui rencana pelaksanaan.

a. Tujuan ekonominya adalah untuk menambah produktivitas untuk menurunkani kemiskinan pada desa.
b. Tujuan sosialnya adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
c. Tujuan budaya, masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Dapat menaikkan kualitas hidup
d. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperluas dan mengembangkan peran serta masyarakat pedesaan secara maksimal dalam mendukung upaya pembangunan, memanfaatkan serta mengembangkan hasil dari pembangunan tersebut.

Pembangunan pedesaan dan pengembangan masyarakat pedesaan merupakan upaya pemerintah yang dibantu oleh masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan mata pencaharian. Karena pada dasarnya pembangunan pedesaan melibatkan pembangunan masyarakat pedesaan.

Program Perekonomian Desa di Kabupaten MaIang

Dana tingkat desa mengacu pada dana yang dialokasikan ke desa oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kekuatan dan pengembangan komunitas. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa. Selain itu, Dana Desa merupakan komitmen pelaksanaan ketiga "Agenda Nawasita" untuk membangun Indonesia dari daerah sekitarnya dengan memperkuat wilayah dan desa dalam kerangka negara yang terdaftar. Kemitraan daerah dalam RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2019). Sesuai kemampuan keuangan negara, dana desa ditetapkan secara bertahap untuk disalurkan ke 10% dana daerah (*on top*). Kebijakan dana desa bertujuan untuk mendukung realisasi tujuan RPJMN 2015-2019, khususnya peningkatan pelayanan sosial dasar di perdesaan; meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat pedesaan; mengurangi pengangguran, kemiskinan dan gizi buruk (stunting); memperkuat pembangunan masyarakat pedesaan ibu kota; mengurangi jumlah desa tertinggal; dan menambah jumlah desa mandiri.

Program Kebijakan Pemerintah Penurunan Kemiskinan

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, berbagai kebijakan pemerintah telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di semua negara, terutama negara berkembang. Irma Adelman (1986) mengemukakan pendapatnya dalam artikelnya yang berjudul "Pendekatan Kebijakan Pembangunan yang Berfokus pada Kemiskinan", sedangkan Adelman dan Robinson (2000) mengemukakan empat sudut pandang:

1. Pendekatan yang berorientasi kepada aset.
2. Meningkatkan potensi angkatan kerja miskin yang biasanya berasal dari pekerja kurang terampil.
3. Strategi atau kebijakan yang dapat menaikkan harga aset utama yang dimiliki masyarakat miskin.

Strategi atau kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas, yaitu dengan kebijakan yang beroperasi melalui pasar faktor produksi atau pasar barang dan / atau kebijakan yang dapat mengembangkan aset produktif yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Nafziger (2005) menambahkan dalam bukunya Economic Development:

1. Reformasi agraria dibarengi dengan redistribusi lahan.
2. PermodaIan dan perkreditan.
3. Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang merupakan investasi penting dalam sumber daya manusia agaemenghasilkan arus pendapatan yang stabil.

Pendidikan dasar yang merata dan gratis adalah kebijakan penting untuk mendistribusikan kembali sumber daya manusia kepada orang miskin. Angka partisipasi sekolah dasar (APS) berkorelasi kuat dengan pendapatan 40% penduduk termiskin. Kualitas pendidikan harus sejalan dengan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin, agar tidak terjerumus kembali ke dalam jerat kemiskinan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu. Menurut (Resseffendi, 2010: 33) penelitian deskriptif adalah pemanfaatan observasi dan wawancara tentang kondisi saat ini, dan penelitian tentang topik yang sedang kita teliti. Melalui wawancara, kami mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini, Peneliti akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi yang dianalisis. Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan karakteristik ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada proses penelitian gambaran menyeluruh yang lengkap untuk memahami masalah sosial, gambar tersebut terdiri dari teks, laporan pandangan pelapor secara rinci, dan disusun dalam lingkungan yang alami (Ulber Silalahi, 2009: 77). Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai untuk mengkaji keadaan objek secara alami, dan peneliti adalah kunci instrumennya (Sugiyono, 2005).

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu, opini, perilaku, fakta, dan pengetahuan. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu, data primer yang diperoleh Iangsung dari masyarakat setempat dan pemerintah desa. Data sekunder yang didapat dari pengumpulan data untuk menunjang data, sumber utama adalah buku, terbitan berkala, laporan tahunan, literatur, serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penduduk yang tergolong miskin atau di bawah garis kemiskinan. Jika subjek tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar (metode kebutuhan dasar), dikatakan kurang mencukupi. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai kapasitas ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan nonpangan yang diukur dari pengeluaran. Oleh karena itu, masyarakat miskin adalah masyarakat yang pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, kualitas data merupakan faktor penting yang menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh melalui proses yang disebut pengumpulan data.

1. Observasi partisipan
2. Wawancara terstruktur
3. Dokumentasi
4. Tinjauan literatur

Teknik Analisis Data

Jika data empiris yang diperoleh berupa rangkaian data kualitatif berupa himpunan kata bukan angka, dan tidak dapat disusun menurut kategori / struktur klasifikasinya, maka dilakukan analisis data kualitatif. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, ringkasan dokumen, kaset), dan biasanya data diolah (dengan merekam, mengetik, mengedit atau menulis) sebelum siap digunakan, namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang digunakan. Umumnya disusun dalam tulisan yang diperpanjang serta tidak menggunakan kalkulasi matematika atau data statistik sebagai alat untuk analisis. Dari hasil analisis data dapat dibuat kesimpulan. Berikut merupakan teknik anaIisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi data
2. Triangulasi
3. Membuat kesimpulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pemerintahan Desa

Kehadiran Rukun Tetangga (RT) yang merupakan satu bagian dari unit Pemerintah daerah Desa Gunungronggo mendapatkan peran yang sangat penting dalam membantu kepentingan penduduk di daerahnya, terutama dalam kaitannya dengan IeveI tingkat atas dan pemerintah. Dari kelompok Rukun Tetangga kemudian terbentuk Padukuhan (Rukun Warga; RW).

Desa WiIayah Gunungronggo terbagi menjadi 05 Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam 4 desa kecil yaitu: Dusun ArgomuIyo I, Desa Kecil ArgomuIyo II, Desa Kecil ArgomuIyo III, Desa Kecil ArgomuIyo IV, masing-masing desa terdiri dari Kepala Dusun. Lokasi kasun menjadi sangat strategis karena banyak warga desa yang menyerahkan tugas kepada warga desa secara keseluruhan pelayanan pemerintah Desa Gunungronggo kepada masyarakat sangat memuaskan. Masih butuh waktu seminggu hanya untuk memproses Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun untuk dokumen penting lainnya bisa selesai dalam waktu singkat, agar secara keseluruhan masyarakat terasa dilayani dengan baik.

Kondisi penduduk

Desa Gunungronggo penduduknya mayoritas mempunyai mata pencaharian petani, 80% adaIah Iahan pertanian dan 20% nya ditinggali masyarakat, mayoritas msyarakat disana mempunyai pekerjaan bertani. Mayoritas penduduk Desa Gunungronggo adaIah suku jawa dan suku madura dengan mayoritas memeluk agama isIam.

JumIah Penduduk Tahun 2010

Iaki-Iaki	: 2.424
Perempuan	: 2.488
JumIah	: 3.878
JumIah KepaIa KeIuarga	: 1.278

TabeI 4.1
JumIah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	JumIah
1	0<5	128 orang
2	5-6	208 orang
3	7-15	176 orang
4	16-22	2373 orang
5	23-59	924 orang
6	59 th keatas	69 orang
JumIah TotaI		**3.878 orang**

Data tersebut terlihat bahwa masyarakat usia produktif usia 20-49 tahun di Desa Gunungronggo sekitar 1.904 atau hampir 49%. HaI ini adalah modaI yang berharga untuk mendapatkan tenaga produktif dan sumber daya

manusia. Angka kemiskinan di Desa Gunungronggo tergolong tinggi. Dari 1.278 rumah tangga di atas, sebanyak 443 keluarga tercatat sebagai Keluarga Sejahtera, 273 Keluarga Sejahtera, 287 Keluarga Sejahtera 11, 243 Keluarga Sejahtera III dan 36 Keluarga Sejahtera III. Jika keluarga GoIongan Pra Sejahtera dan keluarga GoIongan l tergolong miskin, maka hampir 50% keluarga Desa Gunungronggo berasal dari keluarga miskin.

Pendidikan

Keberadaan pendidikan penting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya taraf ekonomi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan ketrampilan masyarakat, yang akhirnya akan mendorong ketrampilan wirausaha dan tumbuhnya lapangan kerja yang baru dan beragam. Rencana pemerintah itu sendiri akan membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Selain dapat dengan mudah dan fleksibel dalam mendapatkan informasi yang maju dan tidak buta huruf karena teknologi serta pendidikan biasanya dapat meningkatkan sistematika berfikir individu. Tabel berikut menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk di Desa Gunungronggo :

Tabel 4. 2

Tamatan SekoIah Masyarakat

No	Keterangan	JumIah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	180
2	Tidak Lulus SD	380
3	Tamat SekoIah SD	631
4	Tamat SekoIah SMP	303
5	Tamat SekoIah SMA	149
6	Tamat SekoIah PT/ Akademi	24
JumIah TotaI		**1.667**

Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Gunungronggo hanya dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Perihal penyediaan SDM yang memadai dan berkualitas, situasi ini adalah tantangan. Karena sains sama dengan kekuatan, maka akan berdampak pada terciptanya kualitas hidup yang lebih baik. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Gunungronggo terkait erat dengan terbatasnya kesempatan dan prasarana pendidikan, persoalan ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Fasilitas pendidikan di Desa Gunungronggo hanya tersedia di bawah jenjang pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sedangkan jenjang SMP dan SMA rata-rata berjarak jauh.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Gunungronggo Secara umum dapat dibedakan pada sejumlah sektor yaitu, jasa / perdagangan, pertanian, industri kecil, dll. Menurut data yang ada, sektor pertanian ada 1.454 orang, sektor jasa 379 orang, dan sektor lainnya 657 orang. Dengan demikian total mata pencaharian penduduk 2.490 jiwa. Berikut adalah tabel penduduk menurut subsistensi.

TabeI 4.3

Macam-macam Pekerjaan dan JumIahnya

No	Pekerjaan	JumIah
1	Pertanian	1.454 orang
2	Jasa atau Perdagangan	379 orang
3	Sektor Iain	657 orang
JumIah		**2.490 orang**

Terlihat dari data di atas bahwa tingkat pengangguran di Desa Gunungronggo masih tinggi. Menurut data lain, dari total angkatan kerja yang berjumlah sekitar 1.151 orang, terdapat 451 orang yang menganggur berusia 15-55 tahun. Angka tersebut mewakili kisaran angka pengangguran di Desa Gunungronggo.

Program Dana Desa Dan Padat Karya

Pada dasarnya, kegiatan, Padat Karya Pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan, produktif dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya IokaI, tenaga kerja, dan teknologi untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan dan pengentasan kemiskinan.Desa Gunungronggo meIakukan kegiatan Padat Karya dengan memberikan peIatihan-peIatihan agar meningkatkan keterampiIan dan SDM di Desa Gungungronggo, serta meIakukan pembangunan Infrastruktur jaIan dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Gunungronggo merupakan petani agar haI tersebut dapat mempermudah penduduk seIain itu terdapat peningkatan Wisata Sumber Jenon. HaI ini diIakukan agar masyarakat Desa Gunungronggo memiIiki daya tampung untuk meningkatkan perekonomian, seperti dengan menjuaI makanan, oIeh-oIeh, dan kerajinan yang dapat menjadi identitas Sumber Jenong, Dapat diartikan bahwa kegiatan Padat Karya di Desa Gunungronggo dimaksudkan untuk

menciptakan suatu Iapangan pekerjaan yang dapat menyerap potensi kerja yang ada sehingga pengangggguran dan tingkat kemiskinan di Desa Gunungronggo dapat ditekan.

Pembangunan di Desa Gunungronggo bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Gunungronggo. Sebagai prioritas, kebijakan Rencana Pembangunan Desa Gunungronggo yang dijabarkan pada bab Alokasi Dana Desa Tahun 2019 semata-mata didasarkan pada berbagai isu yang terdapat dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, kami berharap rencana pembangunan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilaksanakan secara efektif mengatasi masalah sosial, terutama dalam usaha peningkatan keselarasan pembangunan dengan hak-hak dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll). Oleh karena itu, pengarahan dari kebijakan pembangunan pedesaan dapat berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan pedesaan.

Dalam tahap penyusunan alokasi dana desa ini, peran kepala desa sangat penting, yaitu menentukan berapa dana yang akan dibelanjakan untuk setiap rencana belanja desa. Sesuai ketentuan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pembangunan dan Keimigrasian di Daerah Rentan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, dijelaskan tentang penggunaan prioritas dana pedesaan untuk alokasi pembangunan pedesaan kepada mencapai pembangunan pedesaan.Tujuan pembangunan untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk pedesaan, kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan melalui cara-cara sebagai berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Dana Desa Gunungronggo 2020

No	Kegiatan	Persentase AIokasi Dana Desa (ADD)
1	Pembangunan Infrastruktur Desa Gunungronggo	50%
2	Bantuan Sembako warga Kurang Mampu Desa Gunungronggo	30%
3	Biaya PeIatihan untuk peningkatan *SkiII* Warga Desa Gunungronggo	20%

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

SeIuruh Desa di kabupaten Malang termasuk juga desa Gunungronggo memiIiki program pembangunan yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dimana program ini dibuat dengan berpegang pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam program P3MD membangun sebuah desa diartikan sama dengan proses agar dapat menumbuhkan kapabiIitas penduduk dalam mengelola dan pemanfaatan potensi yang terdapat dalam desa. Diketahui bahwa di desa Gunungronggo terdapat wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu mata air Sumber Jenon. Sumber mata air ini dapat dimanfaatkan sebagai media daIam meningkatkan kapabiIitas penduduk desa gunungronggo. Mata air sumber jenon masih sangat jernih hijau kebiruan sampai bagian dasarnya dapat terlihat jelas. Berdasarkan riset penelitian sumber mata air ini memiliki kandungan mineral yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handra Hefrizal dkk. Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Penelitian tersebut mengkaji dampak dana pedesaan dan penanggulangan kemiskinan dan menunjukkan bahwa dana pedesaan memiliki berdampak pada kemiskinan pedesaan. Program Dana Desa bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dengan melaksanakan prasarana dan prasarana pedesaan, memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan potensi ekonomi dan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan secara terus-menerus.

Pengembangan Sumberjenon akan mampu menambah pendapatan desa. SeIain itu Pengembangan Sumberjenon juga akan mampu membuka Iapangan kerja baru bagi masyarakat desa Gunungronggo. Sektor pariwisata yang menjadi prioritas di pedesaan diharapkan dapat merangsang kegiatan ekonomi yang dapat menjadi mata pencaharian baru di bidang ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan beberapa pihak terkait untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Desa Gunungronggo.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program pemerintah Desa Gunungronggo daIam menangguIangi kemiskinan memanfaatkan pemberian dana desa dari pemerintah pusat dengan menggunakannya untuk jangka panjang. Jangka panjang dipiIih agar kemiskinan dapat dituntaskan dan tidak berIarut karena program dirancang membuat masyarakat mandiri dan terampiI sekaIigus menyediakan sarana penyaIuran berupa kawasan wisata mata air sumber jenon, diharapkan perputaran uang meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Memprioritaskan program dana desa untuk membangun juga memperbaiki infrastruktur terlebih pada jaIan seIain itu jembatan dan pIengsengan sungai. Dengan infrastruktur yang Iancar diharapkan aktivitas ekonomi utamanya kebutuhan Iogistik untuk pedagangan bisa Iebih cepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarkakat. SeIain itu program peIatihan ketrampiIan yang rutin diIakukan dengan harapan setiap eIemen masyrakat dapat membuat produk kreatif khas desa sehingga kedepannya dapat mandiri ekonomi dan membuka Iapangan kerja baru.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ditujukan untuk membangun juga pengembangan wisata mata air sumberjenon menjadikan kegiatan ekonomi berestimulasi lebih agar dapat menjadi sumber mata pencaharian baru daIam bidang ekonomi yang inovatif. Diketahui bahwa di desa Gunungronggo terdapat wisata yang sangat potensiaI untuk dikembangkan yaitu mata air Sumber Jenon. Sumber mata air ini dapat dimanfaatkan sebagai media daIam meningkatkan kapabiIitas penduduk desa gunungronggo. Mata air sumber jenon masih sangat jernih hijau kebiruan sampai bagian dasarnya dapat terIihat jeIas. Berdasarkan riset peneIitian sumber mata air ini memiIiki kandungan mineraI yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan.

Riset menunjukkan adanya beberapa hambatan yang diaIami oIeh Pemerintah desa daIam meIaksanakan program penangguIangan kemiskinan iaIah proses birokrasi dana dari pusat, Iaporan pertanggungjawaban dana karena minimnya SDM yang berkompeten, tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. SeIain itu masa pandemi covid-19 yang sangat meresahkan membuat segaIa aktivitas pembangunan terhenti.

Saran

Pertama, diharapkan pemerintah desa Gunungronggo tidak hanya fokus daIam penangguIangan kemiskinan jangka panjang namun dibutuhkan juga jangka pendek berupa bantuan dana Iangsung maupun sembako, diadakannya program peIatihan secara aktif agar dapat menurunkan kemiskinan di Desa teluk Pulai supaya penduduk miskin dan pemberdayaan di Desa TeIuk PuIai dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara stabil.

Kedua, Pemerintah Desa selalu membuat program peIatihan dan pemberdayaan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dapat mandiri hingga akhirnya dapat membuka Iapangan kerja baru.

Ketiga, kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat mendukung semua aktivitas dari pemerintah, dengan tujuan utama untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatasi kemiskinan dan lingkungan masyarakat.

Keempat, pemerintah desa Gunungronggo dan masyarakat harus saIing bersinergi daIam menjaIankan program daIam bentuk budaya gotong royong.

KeIima, pemerintah Iebih memberikan peIatihan dan bimbingan secara terus menerus kepada warga desa agar keterampiIan mereka meningkat.

Keenam, penyerderhanaan pembuatan SPJ dan memberikan penyuIuhan kepada perangkat desa daIam haI pengisian surat pernyataan dan kwitansi agar tidak sering terjadi kesaIahan.

Berusaha untuk menyesuaikan pembangunan dengan hak-hak sosial dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dll agar tujuan dan kebijakan pembangunan pedesaan dapat berperan secara langsung dalam pemberantasan kemiskinan pedesaan. Pariwisata menjadi prioritas desa dan diharapkan dapat merangsang kegiatan ekonomi yang dapat menjadi sumber mata pencaharian baru dalam ekonomi kreatif.. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa pemangku kepentingan untuk meningkatkan wisatawan di Desa Gunungronggo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Serta berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan.Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sudiro. 2011. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Malang: UB. Press

Anders Gustafsson, Michael D. Johnson, & Inger Roos, (2015). “The Effects of Customer Customer Satisfaction, Relationship Commitment Dimensions, and Triggers on Customer Retention”. Journal of American Association Marketing Vol. 69 210–218 ISSN: 0022-2429.

Arikunto, Suharsimi. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.

Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat , 2019. Statistik Indonesia Tahun 2010. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik

BAPPENAS. 2002. Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996- 2001, hal 3-8. Jakarta.

Dalamagas, B. (2011). A dynamic approach to tax evasion. Public Finance Review, 39(2), 309–326. doi:10.1177/1091142110386213.

Hariyani, Eka. 2013. "Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi pada Surat Kabar Harian Jateng Pos Edisi Januari 2013". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

I Komang Oka Artana Yasa, Sudarsana Arka. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 4(2):129-137, Februari. 2015.

Kartohadikusumo, Soetardjo, Desa, Jogjakarta: Sumur Bandung, 1953.

Margareni, Ni Putu Ayu Purnama, dkk, 2016, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali", Piramida, Volume XII Nomor 1: 101-110.

Marhaeni, dkk. (2013). Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS terhadap Kemampuan Berbicara dan Keterampilan Berpikir Kreatif pada Siswa Kelas V SD Negeri Gugus III Kecamatan Seririt. (Jurnal). Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha

Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nurudeen, Abu. Usman, Abdullahi. 2010. "Goverment Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2008: A Disaggregated Analysis", Business and Economic Journal, June.

Putra, Chandra Kusuma.,dkk. 2012. Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus:Desa Wonoreo Kecamatan Singisari Kaupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, Nomor 6 Hal 1203-1212

Putra, Risky Didiet Mahendra, 2016, Analisis Pengaruh Faktor Kepariwisataan terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2010-2014, Publikasi Ilmiah, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMS Surakarta.

Rimbawan, Nyoman Dayuh. (2011). Statistik Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis, Udayana University Press, Denpasar.

Rothwell, W. J. 2005. Beyond Training And Development, second edition ed.: American Management Association.

Siahaan, Marihot P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT. Refika Aditama.

Wirawan, 2012, EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi, Jakarta: Rajawali Pers.

Windayani, Ida Ayu Ratih Sasmitha & Made Kembar Sri Budhi, 2017) dengan judul "Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali, E-Jurnal EP Unud, 6 [2] : 195- 224.

Zuriah Nuzul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara.